

BAB IV

ALASAN PERUBAHAN SIKAP TURKI DALAM MERESPON KEANGGOTAANNYA DI UNI EROPA PADA TAHUN 2016

Strategi Turki dalam upayanya menyesuaikan diri dengan Uni Eropa tercantum dalam *Harmonization Packages* yang merombak beberapa konstitusi Turki dan juga mengadopsi beberapa milik Uni Eropa kedalamnya. Setelah adanya paket harmonisasi, pihak Turki mengatakan bahwa strategi untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa harus di *update*, maka Turki mengadakan *upgrading* strategi yang masih sama tujuannya untuk mencapai standar Uni Eropa disemua bidang melalui proses reformasi yang dipercepat, menentukan prioritas masalah yang terkait dengan bab negosiasi, dan implementasi rencana komunikasi yang kuat yang menonjolkan signifikansi dan potensi kerja sama Turki-Uni Eropa dalam pembangunan sebuah arsitektur Eropa di tengah-tengah regional dan keras tantangan global (Republic of Turkey: Ministry for EU Affairs).

Ditengah negosiasi yang tidak berjalan lancar khususnya pasca kudeta militer 2016 yaitu dengan adanya respon yang berubah dari Uni Eropa yang sebelumnya mengatakan akan mempercepat proses pembukaan bab-bab selanjutnya di akhir 2016 dan akan mempercepat proses *visa liberalization* di akhir Juni 2016 justru dengan adanya kejadian pembersihan kudeta militer tersebut Uni Eropa tidak menjalankan komitmennya. Adanya perubahan tersebut membuat Turki mencari alternative lain yang apat digunakannya sebagai strategi baru yang dapat menarik minat Uni Eropa kembali.

Turki menemukan bahwa meskipun Turki adalah negara pemohon tetapi setelah sebelumnya dilihat lemah, Turki mengganti strateginya dengan memanfaatkan *bargaining power* yang dimilikinya sebagai bentuk dari alternative terbaik Turki dalam negosiasi aksesi Uni Eropa.

Maka dari itu pada BAB IV ini dijelaskan mengenai alasan perubahan sikap Turki dalam merespon keanggotaannya di Uni Eropa pada tahun 2016 yang mana perubahan tersebut dilihat dari adanya perbedaan strategi yang digunakan yang mulanya bersifat *yielding* kemudian menjadi *inaction*. Terdapat beberapa kaitan antara respon Uni Eropa terhadap upaya pembersihan pelaku kudeta yang dilakukan oleh Turki dan juga referendum yang diadakan dalam rangka pergantian sistem pemerintahan negara tersebut. Selain itu didukung dengan Turki yang merasa sebagai negara yang memiliki posisi strategis yang dibutuhkan oleh Uni Eropa.

A. Kekecewaan Turki terhadap Respon Uni Eropa Mengenai Kudeta Militer 2016 di Turki

Kudeta yang terjadi di Turki menimbulkan berbagai respon dari negara-negara di dunia. Adanya kudeta tersebut juga menimbulkan respon dari Uni Eropa mengenai kekhawatiran akan stabilitas negara Turki. Dalam menghadapi kudeta tersebut, pemerintah Turki memutuskan untuk menetapkan status darurat. Yang dimaksud dengan status darurat negara (*state of emergency*) adalah keadaan dimana pemimpin negara menyatakan untuk menunda suatu fungsi yang normal dari sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan tetapi juga status darurat ini dapat diberlakukan dalam hal merubah kehidupan normal warga negaranya. *State emergency* ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara untuk melampaui atau mengecualikan aturan hukum atas nama kepentingan public (Schmitt, 1985; Jafar, 2017). Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Presiden Erdogan menetapkan status darurat Turki yang akan diberlakukan selama 3 bulan. Sebagai seorang presiden, hal ini bukanlah hal yang dapat dikatakan salah karena presiden memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Penetapan status darurat tersebut mendapat dukungan dari Uni Eropa dengan

alasan agar Turki dapat mengembalikan stabilitas negaranya kembali.

Selama masa darurat tersebut, Presiden Erdogan melakukan berbagai hal yang dianggapnya sebagai penyebab terjadinya kudeta dan membahayakan stabilitas keamanan dan pemerintahan Turki yaitu dengan melakukan penangkapan pihak-pihak yang dianggap sebagai pemicu kudeta serta pihak-pihak yang dikatakan sebagai pendukung Gulen, serta memecat sejumlah guru dan pejabat pemerintahan, juga mencabut izin beberapa stasiun TV. Hal yang dilakukan Presiden Erdogan ini dikatakan sebagai hal yang menyimpang dari HAM menurut Uni Eropa. Selain itu, Presiden Erdogan juga berkali-kali mengatakan dalam pidatonya bahwa Turki akan kembali memberlakukan hukuman mati karena hal ini ditargetkan untuk para pelaku kudeta militer 2016. Pihak Uni Eropa menyayangkan perbuatan Presiden Erdogan dan kemudian mengatakan akan mempertimbangkan kembali aksesinya Turki. Presiden *European Commission* Jean Claude Juncker mengatakan bahwa proses aksesinya Turki-Uni Eropa akan dihentikan jika Turki memberlakukan kembali hukuman mati dan tidak akan ada kesempatan bagi Turki untuk sama sekali menjadi anggota Uni Eropa yang ia katakan dalam salah satu program TV Perancis (REUTERS, 2016). Uni Eropa memperingatkan Turki bahwa penolakan terhadap hukuman mati merupakan hal yang menjadi salah satu elemen utama dalam akuisisinya Uni Eropa (Council of The European Union, 2016). Sementara Uni Eropa mendeklarasikan pernyataan tersebut, Kanselir Austria Christian Kern menyarankan untuk menghentikan aksesinya terkait pelanggaran standar demokrasi yang dilakukan oleh Turki dalam merespon kudeta militer 2016 (REUTERS, 2016). Hal itu pula dikatakan oleh menteri luar negeri Austria yaitu Sebastian Kurz bahwa ia akan memberikan vetonya untuk membekukan proses aksesinya. Selain itu pernyataan itu juga diberikan oleh Angela Merkel dan didukung oleh Macron mengenai Turki yang sudah tidak lagi memiliki kesempatan mendapatkan status *full membership* dalam Uni Eropa (REUTERS, 2016).

Tak lama berselang, Erdogan mengatakan bahwa status darurat Turki akan diperpanjang. Setelah itu Erdogan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Turki yang tentunya pada masa darurat ini dapat mengeluarkan dekrit apapun mengusulkan untuk mengatakan referendum. Referendum ini terkait dengan beberapa perubahan dalam Turki terutama terdapat perubahan yang sangat besar yaitu perubahan konstitusi Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial (BBC News, 2017). Adanya wacana referendum ini turut menimbulkan reaksi dari Uni Eropa. Uni Eropa mengatakan kekhawatirannya terhadap referendum tersebut yang dinilai akan menjadikan Turki sebagai negara dibawah pemimpin otoriter dimana hal tersebut juga dinyatakan sebagai hal yang bertentangan dengan Uni Eropa. Kanselir Angela Merkel terang-terangan mengutuk hal tersebut dan mengatakan bahwa Turki diibaratkan sebagai sebuah bus dimana Presiden Erdogan adalah sopirnya. Wacana referendum tersebut juga menjadi hal yang memperburuk kondisi hubungan Turki dan Uni Eropa karena beberapa negara seperti Jerman, Belanda dan negara-negara lainnya berniat untuk memblokir kedatangan menteri luar negeri Turki yang mana dicurigai negara-negara tersebut bahwa kedatangan pihak pemerintah Turki sebagai upaya untuk mendapatkan suara dari diaspora Turki di Eropa.

Kekecewaan Turki ini kemudian berujung pada pidato-pidato Presiden Erdogan beserta beberapa menternya mengenai akses Turki-Uni Eropa. Kekecewaan Turki ini bermula akibat tidak adanya solidaritas Uni Eropa pada Turki yang merupakan negara kandidat. Turki melakukan upaya pembersihan untuk menjaga stabilitas negara yang mana adanya kudeta militer tersebut telah merugikan warga sipil di tengah Turki yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi, namun yang dilakukan oleh Uni Eropa justru menyoroti hal tersebut sebagai pelanggaran HAM dan *acquis*.

Upaya penyelesaian permasalahan dalam domestic Turki dinilai oleh Turki sebagai alasan yang dibuat-buat oleh Uni Eropa untuk menghambat proses akses dan sengkaja untuk

lagi-lagi membuat Turki menunggu. Turki yang telah memenuhi komitmennya sejak dinyatakan sebagai negara kandidat juga sebagai negara yang telah bersedia menampung jutaan pengungsi demi menyelamatkan Uni Eropa dan mengurangi jumlah arus pengungsi di Yunani dan sekitarnya, tetapi Uni Eropa sendiri tidak memenuhi komitmennya. Salah satu dari kesepakatan migrasi antara Uni Eropa dan Turki pada maret 2016 adalah dengan memberikan *visa liberalization* untuk penduduk Turki ke Uni Eropa, dan Uni Eropa telah menjanjikan bahwa di akhir Juli akan memberikan *visa liberalization* tersebut tetapi beberapa bulan kemudian justru Uni Eropa mengulur-ulur dengan mengatakan bahwa Turki belum memenuhi kriteria dalam hal Undang-Undang terorisme padahal visa tersebut telah disepakati tanpa da syarat yang harus dilakukan oleh Turki terlebih dahulu. Kemudian janji Uni Eropa lainnya untuk membukan bab-bab negosiasi lainnya secepat mungkin di tahun 2016 tidak ditepati dan justru mengatakan dengan adanya insiden kudeta tahun 2016 tersebut maka proses aksesi akan dihentikan (REUTERS, 2016).

Selain itu Turki juga kecewa dengan Uni Eropa yang langsung beraksi dan menuding Turki melakukan pelanggaran HAM dan langsung mengatakan bahwa untuk jangka panjang akan membekukan proses aksesi bahkan akan menghentikannya bila Turki memberlakukan kembali hukuman mati. Kekecewaan ini karena pihak Turki sendiri bahkan masih mendiskusikan hal tersebut. Hukuman mati yang diwacanakan akan diberlakukan kembali belum pasti akan benar-benar diberlakukan. Hukuman mati tersebut masih menjadi pertimbangan untuk menjadi hukuman yang pas atau tidak bagi pelaku kudeta (REUTERS, 2016).

Maka dengan adanya kekecewaan tersebut menimbulkan reaksi dari Turki yang mengatakan bahwa Turki secepatnya membutuhkan jawaban dari Uni Eropa yang terlebih dahulu mengatakan akan menyudahi proses aksesi karena dari pihak Uni Eropa sendiri tidak ada yang menyatakan akan keluar dari meja perundingan. Selain itu Turki pun mengatakan akan bersikap acuh tak acuh terhadap

proses aksesi karena kekecewaannya sebagai negara kandidat yang selalu menjadi negara kandidat tanpa kepastian. Presiden Erdogan mengatakan bahwa jika Uni Eropa tidak bisa serius dalam memenuhi komitmen maka Turki yang telah memenuhi komitmennya dalam kesepakatan migrasi dapat kapan saja membuka gerbang pembatas antara pengungsi dengan Uni Eropa sehingga Uni Eropa patut waspada akan banjir pengungsi yang kapan saja akan datang.

Walaupun terdapat kekecewaan yang dirasakan oleh Turki terhadap Uni Eropa, namun Turki sendiri jelas menyatakan bahwa tidak akan menjadi pihak yang terlebih dahulu meninggalkan meja negosiasi. Meskipun tidak keluar dari meja perundingan namun seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Turki menjadi acuh tak acuh pada proses aksesi yang mana dalam beberapa pertemuan Turki dan Uni Eropa membahas isu-isu lain seperti penguatan kerjasama ekonomi bilateral dan pembahasan terorisme. Hal ini tentunya memperlihatkan walaupun adanya ketegangan antara kedubelalihpiah, keduanya masih saling membutuhkan.

B. Posisi Strategis Turki yang Dibutuhkan oleh Uni Eropa

Menurut Uni Eropa, Turki merupakan mitra kerjasama yang menguntungkan bagi Eropa dan atas pertimbangan itu pula yang menjadikan Turki dapat menjalin kerjasama dalam hal *custom union* bersama dengan Uni Eropa. Pertama hal ini dilihat berdasarkan pada tahun 1993 dimana Turki merupakan kekuatan insdustri dan militer yang signifikan di kawasan antara Eropa dan Asia Selatan yang mana Turki pula telah menjadi poros seluruh *Black Sea* atau wilayah Mediterania Timur. Tentunya dalam posisi ini, Turki: memiliki hubungan yang khusus dengan *The Turkish speaking republics of the CIS*; menjadi negara yang meluncurkan kerjasama *Black Sea Economic Cooperation* (BSEC); menjadi bagian dari organisasi kerjasama ekonomi antara Turki, Iran, Pakistan dan Republik Asia Tengah dalam CIS; Peran potensia Turki dalam

skema kerjasama regional fungsional (berdasarkan pada perdagangan air dan suplai energy, dll) dalam proses perdamaian Timur Tengah yang diperpanjang; serta jaringan perjanjian perdagangan bebas EFTA.

1. Turki sebagai Salah Satu Mitra Utama Ekonomi Uni Eropa

Turki adalah salah satu mitra dagang utama Uni Eropa di kawasan Euro-Mediterrania dan di sumbu Eurasia. Pada tahun 1980, Turki menjadi pemasok urutan ke 44 kepada komunitas Eropa tersebut dengan angka sebesar 1.2 miliar dolar. Pada tahun 1995 mengalami peningkatan dengan menjadi pemasok urutan ke Sembilan belas dengan angka 7.6 miliar dolar. Perihal impor, pada tahun 1980 Turki berada di peringkat ke 26 dengan angka impor sebesar 2.1 miliar dolar dari Komunitas tersebut. Kemudian di tahun 1995 naik ke peringkat 10 dengan angka impor 10.5 miliar dolar sehingga digolongkan sebagai pasar utama Komunitas. Volume perdagangan Turki-Uni Eropa diperkirakan mencapai angka 20 miliar dolar pada akhir tahun 1994, dengan kata lain Turki telah naik dari peringkat ke 48 ke peringkat 11 dalam urutan kerjasama Uni Eropa dengan negara-negara di dunia. Sehingga dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi tersebut menjadi Turki sebagai mitra investasi yang menari di kawasan mediterania dan *Black Sea* bagi Uni Eropa (Kalegasi, 1995; Baycar, 2009). Uni Eropa telah menjalin kerjasama perdagangan dengan 215 negara di dunia dengan Turki sebagai mitra yang terus mengalami kenaikan dalam urutan kerjasama ekonomi Uni Eropa yang hingga kini telah menduduki posisi enam teratas sebagai mitra kerjasama utamanya. Data ini diperoleh berdasarkan table urutan kerjasama perdagangan Uni Eropa dengan hasil sebagai berikut (European Commission):

Tabel 4.1

Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade (value %) (Excluding intra-EU trade)								
No.	Total EU Trade with...	Share (%)	EU Imports from...	Share (%)	EU Exports to...	Share (%)	EU Trade Balance with...	Million Euro
1.	USA	16.9	Cina	20.2	USA	20.0	USA	119,063
2.	Cina	15.3	USA	13.8	Cina	10.5	Swiss	39,990
3.	Swiss	7.0	Rusia	7.8	Swiss	8.0	UAE	32,603
4.	Rusia	6.2	Swiss	5.9	Rusia	4.6	Hongkong	25,780
5.	Turki	4.1	Norwegia	4.2	Turki	4.5	Australia	21,676
6.	Jepang	3.5	Turki	3.8	Jepang	3.2	Turkey	14,717

Turki menjadi negara yang dibutuhkan oleh beberapa negara di Uni Eropa dalam hal peningkatan perekonomian negara mereka. Seperti contohnya Rumania yang telah menjadi salah satu anggota Uni Eropa sejak tahun 2006 lalu. Dalam pertemuan di Istanbul dalam rangka merayakan 25 tahun Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam (BSEC), Menteri Luar Negeri Rumania Teodor Melescanu mengatakan bahwa Rumania menjadi negara yang mengandalkan masuknya Turki menjadi anggota Uni Eropa karena hal tersebut dapat menciptakan basis yang sangat menguntungkan dalam hubungan ekonomi yang mereka jalin. Menlu Rumania tersebut menambahkan bahwa mengembangkan investasi perusahaan Turki sangat penting bagi negaranya tersebut yang telah mendapatkan banyak keuntungan terutama dalam bidang pertanian, produksi industri, sektor otomotif dan komunikasi (TRT, 2017). Turki merupakan investor terbesar kedua di Rumania setelah Italia dengan kisaran 14000 perusahaan Turki yang aktif beroperasi disana (Romania Insider). Sedangkan

untuk negara-negara lainnya di Uni Eropa, Turki menjadi urutan 15 teratas dalam kerjasama perdagangan.

Perdagangan bilateral antara Uni Eropa dan Turki tumbuh sangat kuat setelah keduanya terjalin dalam *Bilateral Preferential Trade Framework* (BPTF) yang telah berlangsung selama 20 tahun. Bagi Uni Eropa, Turki menjadi mitra dagang yang sangat penting khususnya sebagai tujuan ekspor Uni Eropa dimana pangsa ekspor Uni Eropa ke Turki naik dari sekitar 3% pada awal periode BPTF menjadi sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir. Selain impor Uni Eropa dari Turki turut meningkat dari 2% menjadi 3%. Kerjasama perdagangan Turki dan Uni Eropa memang mengalami peningkatan tetapi setelah adanya komitmen terhadap rezim perdagangan terbuka yang diamanatkan oleh BPTF menghasilkan perdagangan dengan pihak ketiga yang bahkan lebih melonjak lagi. Hal tersebut menghasilkan peningkat impor Turki dari Uni Eropa sekitar 230% selama periode tersebut dari sekitar 17 miliar Euro menjadi 56 miliar Euro (European Commission, 2016).

2. Kerjasama Pengungsi antara Turki dan Uni Eropa

Selain kerjasama ekonomi yang cukup erat dan saling menguntungkan antar keduanya, kerjasama lainnya yang dimiliki oleh Uni Eropa dan Turki adalah perihal pengungsi. Latar belakang kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki ini dilakukan karena adanya peningkatan jumlah pengungsi yang mencari suaka ke Eropa yang bermula pada tahun 2014. Para pengungsi yang datang ke Eropa datang melalui jalur laut dengan menyebrangi laut Mediterania maupun melalui jalur wilayah Turki. Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke Eropa dapat dilihat dari laporan UNHCR yang mencatat bahwa para pencari suaka ke Eropa yang masuk melalui Laut Mediterania hingga tahun 2015 mencapai 1.000.573 jiwa yang terdiri dari 49% warga Suriah, 21% warga Afghanistan, 8% warga Irak, dan sisanya dari negara-negara yang mengalami kondisi politik yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Perhatian serius dari Uni Eropa terhadap krisis

pengungsi yang terjadi di Eropa ketika April 2015 adanya kapal pengungsi yang tenggelam saat akan memasuki Eropa dengan menggunakan jalur laut Mediterania dan menewaskan 1.200 orang (BBC Indonesia, 2017). Peristiwa tersebut membuat perhatian Uni Eropa untuk mengatasi krisis pengungsi dengan berbagai cara seperti meningkatkan alokasi dana untuk memperketat perbatasan 66 menuju Eropa, mencegah imigran gelap, peluncuran Operasi Sophia, dan mengajukan kuota pencari suaka baru di Eropa yang menimbulkan pro dan kontra antar sesama negara anggota Uni Eropa yang setuju dan menolak menerima pencari suaka. Kebijakan Uni Eropa tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal karena laju pengungsi yang semakin hari semakin meningkat. Tahun 2015 Frontex mencatat bahwa mencapai 1,83 juta orang pengungsi yang memasuki Eropa. Negara yang sangat merasakan lonjakan jumlah pengungsi tersebut adalah negara yang berada di garis depan seperti Yunani, Hungaria, Kroasia, Spanyol, Siprus, Malta dan Italia (Frontex, 2017).

Penanggulangan krisis pengungsi di Eropa saat ini menjadi fokus penting bagi EU, terutama negara-negara anggota yang menjadi jalur masuk utama pengungsi di wilayah Balkan barat, seperti Yunani dan Hungaria. Yunani sendiri merupakan rute utama bagi pengungsi yang melewati jalur Balkan barat yang kemudian nantinya mereka akan menuju Hungaria. Hungaria sendiri posisinya adalah sebagai tempat transit utama bagi pengungsi yang akan menuju ke Eropa Barat, khususnya Jerman (Independent, 2017).

Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman mengeluarkan kebijakan untuk menampung pengungsi dengan terbuka dan mengatakan bahwa pemohon suaka akan diperlakukan dengan baik. Sejak tahun 2014, Jerman telah menampung sejumlah pengungsi dan menyatakan akan menambah jumlah penerimaan pengungsi di tahun 2015. Hal ini menimbulkan pro dan kontra antara sayap kiri dan sayap kanan di Jerman. Sayap kiri pro dengan keputusan tersebut karena dinilai

membawa manfaat bagi Jerman yang telah berkurang populasinya terutama untuk kalangan produktif sehingga adanya pengungsi dapat menambah angka pekerja. Sedangkan kalangan sayap kanan menolak keras keputusan tersebut. Adanya pro kontra tersebut tentunya menimbulkan krisis politik yang menghasilkan perpecahan dan berdampak tidak baik pula bagi internal negara Jerman.

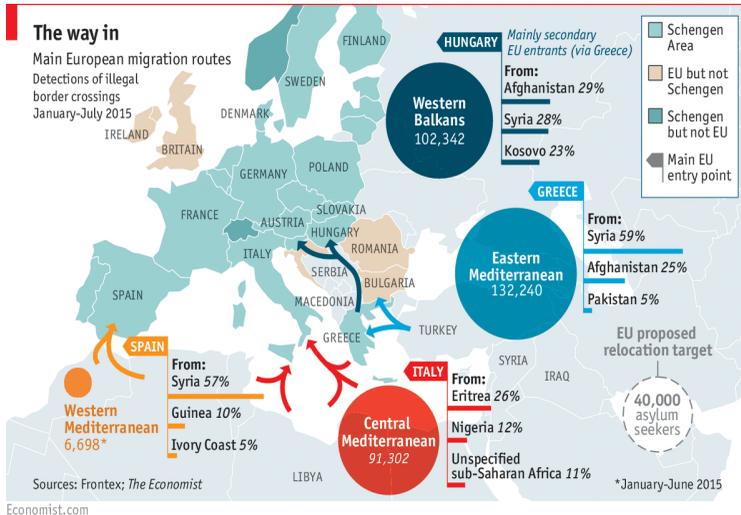
Sementara adanya krisis politik, negara-negara yang memiliki pelabuhan yang menjai pintu masuk pengungsi dari jalur Laut Mediterania mengeluhkan jumlah pengungsi yang kian membanjiri negara mereka. Sehingga kemudian diadakan beberapa KTT mengenai perumusan kebijakan *asylum seekers*. Kemudian di KTT yang keempat lahirlah kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS). Didalam kebijakan yang lemah karena tidak mengikat tersebut terdapat aturan mengenai pembagian kuota penerimaan pengungsi yang mana ditolak oleh banyak negara anggota Uni Eropa. Negara-negara yang menolak adanya pembagian kuota tidak membantu negara-negara yang menerima pengungsi sama sekali. Dengan adanya hal tersebut membuat beberapa negara penerima pengungsi terbanyak seperti Jerman dan Perancis mengusulkan untuk pembagian kuota secara adil sesuai dengan kondisi masing-masing negara namun usulan tersebut ditolak oleh negara-negara lain.

Adanya ketidakpastian mengenai aturan kuota pengungsi menyebabkan negara-negara berpelabuhan seperti Yunani, Italia, dan Spanyol menderita. Penderitaan yang dirasakan oleh negara-negara tersebut akibat adanya Konvensi Dublin yang mengatur negara mengenai kewajiban negara penerima untuk memproses permintaan suaka dan memberikan persetujuan pada para pemohon hingga tuntas agar dapat melanjutkan perjalanan ke negara tujuan, yang mana tujuan utama dari Konvensi ini adalah untuk memfiltrasi pemohon suaka. Tetapi yang dialami oleh negara-negara pintu utama tersebut adalah kewalahan menghadapi jumlah pengungsi yang membludak dan tidak henti-hentinya

berdatangan. Akibat dari hal itu, negara-negara penerima tersebut melanggar Konvensi Dublin dengan membiarkan begitu saja pengungsi-pengungsi untuk melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan.

Selain krisis politik dan juga ketidaksanggupan negara-negara garis depan untuk menerima banjirnya pengungsi, terdapat pula kebijakan-kebijakan yang dibuat sendiri oleh beberapa negara yang bersifat rasis. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Slovakia, Polandia dan juga Hungaria yang berisi tentang penyaringan pencari suaka berdasarkan agama yang dianut. Ketiga negara itu mengutamakan yang beragama Nasrani untuk kemudian dapat diproses, sedangkan pemohon suaka dengan agama-agama selain Nasrani tidak mendapatkan haknya untuk diproses dan bahkan akan dideportasi. Kebijakan ini menimbulkan komentar-komentara negatif bahkan dari pemimpin Katolik sedunia sekalipun yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan kekerasan dan rasisme.

Adanya hal-hal yang dapat memengaruhi stabilitas negara-negara Uni Eropa tersebut yang kemudian mendorong terjadinya kesepakatan antara petinggi Uni Eropa bersama pemimpin negara-negara anggotanya untuk mengadakan kerjasama perihal tersebut dengan Turki beserta kesepakatan untuk memberikan dana penunjang kerjasama tersebut. Turki dipilih karena memiliki letak yang strategis sebagai salah satu pintu masuk utama ke wilayah Eropa.



Gambar 4.1: Rute pengungsi menuju negara-negara Uni Eropa.

Sumber: <https://www.weforum.org/agenda/2016/03/why-the-syrian-refugee-crisis-is-just-the-tip-of-the-iceberg>

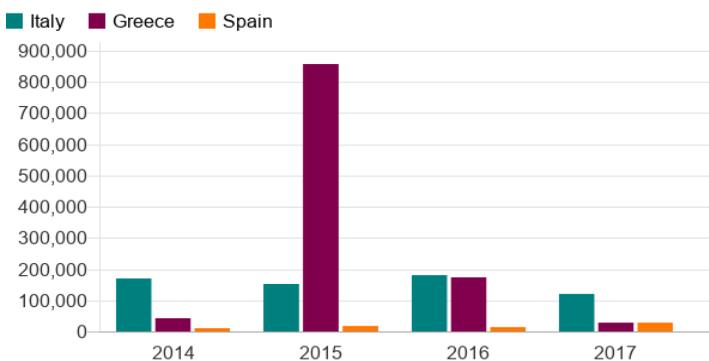
Berdasarkan pada peta tersebut dapat kita lihat bahwa Turki merupakan salah satu pintu masuk utama bagi para pengungsi menuju ke Eropa dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya. Turki menjadi pintu masuk bagi pengungsi menuju ke Yunani sebagai wilayah transit bagi pengungsi untuk menuju ke negara-negara di Eropa Barat terutama menuju ke Jerman. Turki merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan *Open Door* bagi pencari suaka sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Uni Eropa untuk menjalin kerjasama dengan Turki. Namun walaupun Turki memiliki kebijakan seperti itu, Turki tetap hanya menjadi negara transit karena para pengungsi tersebut bertujuan untuk ke Eropa yang mereka nilai sebagai kawasan dengan negara-negara yang maju yang diharapkan dapat memberikan kehidupan yang layak untuk mereka contohnya seperti Jerman. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara pada pengungsi yang tiba di Yunani dimana 2/3 dari mereka menjawab bahwa mereka

masuk ke Yunani lewat Turki dengan alasan tidak menetap disana adalah kurangnya kesempatan kerja non-eksploitatif yang cocok dengan keterampilan mereka, kebutuhan keuangan, kepedulian terhadap keamanan dan perlindungan, mencari peluang yang lebih baik untuk anak-anak mereka, dan harapan untuk peluang pendidikan (Zone Books, 2016).

Kesepakatan ini diterima oleh Turki dengan beberapa syarat yang diajukan oleh Turki yaitu adanya *visa liberalization* dan kelanjutan pembahasan bab negosiasi secepat mungkin. Kedua syarat tersebut diterima oleh Uni Eropa bahwa di akhir 2016 akan ada pembukaan bab negosiasi selanjutnya dan sisa pembahasan akan dibuka secepat mungkin setelahnya serta proses visa untuk rakyat Turki akan dilakukan dan paling lambat berakhir pada Juni 2016. Dengan adanya kerjasama yang dibangun antara Uni Eropa dan Turki mengenai pengungsi tersebut berhasil menurunkan angka pengungsi yang masuk ke Uni Eropa, hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh berdasarkan statistic UNHCR sebagai berikut:

Migrants and refugees

Total arrivals 2014-17



Source: UNHCR

BBC

Gambar 4.2: Data kedatangan pencari suaka ke Uni Eropa.

Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Presiden Erdogan menyampaikan bahwa Uni Eropa sangat membutuhkan Turki. Turki kecewa terhadap Uni Eropa yang ingkar terhadap komitmennya. Presiden Erdogan mengatakan bahwa Turki telah bertanggung jawab memenuhi komitmennya dan berhasil membantu Uni Eropa dalam banyak hal terutama permasalahan pengungsi. Tetapi yang dilakukan oleh Uni Eropa justru mengatakan ingin menyudahi proses akses yang mana pernyataan tersebut tidak hanya sekedar dilontarkan di media tetapi merupakan perundingan tingkat tinggi pemimpin-pemimpin negara di Parlemen Eropa. Dengan adanya respon yang tidak baik tersebut maka Turki berupaya untuk mengganti strateginya yaitu dari *yielding* menjadi *inaction*. Tentunya dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa Turki sudah tidak lagi ingin menjadi anggota Uni Eropa dan Turki akan mengabaikan kesepakatan kerjasama pengungsi, digunakan untuk memotivasi Uni Eropa agar merespon Turki dan mempertimbangkan bahwa Uni Eropa membutuhkan Turki. Hal ini dilihat dari bagaimana kekecewaan Turki terhadap Uni Eropa yang mengingkari komitmennya mengatakan bahwa Turki bersikap tidak peduli pada kerjasama pengungsi dan juga bersikap acuh tak acuh pada keanggotaan penuhnya dalam Uni Eropa. Walaupun dengan pernyataan dan dengan *progress* yang dinilai melambat serta dibuktikan dengan tidak adanya *progress report* tahun 2017, Turki berkali-kali menyatakan belum akan meninggalkan meja negosiasi dalam beberapa kesempatan. Salah satu pernyataan mengenai pandangan Turki terhadap aksesinya dalam Uni Eropa adalah pernyataan Presiden Erdogan pada pertemuan parlemen di *Turkish National Assembly 2017* bahwa Turki tidak meninggalkan meja negosiasi dan tidak menjadi pihak yang menyerah namun faktanya adalah Turki tidak membutuhkan Uni Eropa melainkan Uni Eropa yang membutuhkan Turki. Presiden Erdogan juga mengatakan bahwa Uni Eropa telah salah paham dengan kesabaran Turki selama proses akses berlangsung sejak awal. Menurut Turki, jika Uni Eropa

bersedia menerima maka Turki siap untuk berkontribusi namun jika tidak maka hal itu tidak memengaruhi Turki (Hurriyet Daily News, 2017).

Turki memandang bahwa kesepakatan kerjasama terkait pengungsi menjadi kunci bagi Turki terutama Turki menjadi negara penampung pengungsi terbesar urutan pertama di dunia dengan jumlah yang telah mencapai angka lebih dari 3.5 juta pengungsi. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Komisaris Uni Eropa, Dimitris Avramopoulos yang mengatakan bahwa kerjasama dengan Turki adalah pemeran kunci (DW, 2016). Turki telah berhasil membantu terjadinya penurunan pengungsi yang berdatangan ke Uni Eropa terutama ke salah satu pintu utamanya yaitu Yunani serta mengurangi angka kematian di laut. Turki juga telah menjadi negara yang menerima pengungsi-pengungsi dari Yunani yang belum diproses sejak tahun 2016 sehingga membawa keuntungan sangat signifikan bagi Yunani maupun negara-negara Eropa yang menjadi destinasi pengungsi selanjutnya setelah memasuki Yunani. Perdana Menteri Yunani yaitu Alexis Tsipras mengatakan bahwa Yunani memberikan dukungan penuh kepada kesepakatan kerjasama Turki-UE terkait pengungsi karena setelah adanya kerjasama tersebut yang sebelumnya terdapat 3000 hingga 4000 pengungsi yang masuk ke pulau-pulaunya namun setelah adanya kerjasama dengan Turki jumlah pendatang berkurang drastis lebih dari 90% yaitu hanya sekitar 50 hingga 60 orang per harinya (Reuters, 2016).

Ahli Intelijen Yunani, Athanassios Drougras mengatakan bahwa pernyataan Presiden Erdogan tidak boleh diabaikan begitu saja dan bahwa adanya pernyataan yang dilontarkan Presiden Turki tersebut membuat Kepala Staf Gabungan Yunani prihatin. Yunani melihat bahwa jika Turki betul-betul membuka gerbang pengungsi tersebut maka dengan Yunani yang sedang berada dalam kesulitan finansial dan juga sosial akan semakin berada dalam kesulitan (Independent, 2016).

Selain Yunani, Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan bahwa perjanjian mengenai pengungsi tersebut memuat kepentingan antara Turki dan Uni Eropa. Sebagai respon terhadap pernyataan Presiden Erdogan terkait pembukaan pintu negaranya agar pengungsi membanjiri Eropa tersebut, Angela Merkel menyarankan agar warga Eropa mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, begitu pula dengan Turki. Juru bicara Kemenlu Jerman yaitu Sawsan Chebli turut menyatakan bahwa penting bagi Uni Eropa dan Turki untuk saling berhubungan baik satu sama lain yaitu pentingnya untuk tidak menghentikan pembahasan terkait keanggotaan penuh Turki karena hal tersebut dapat merusak hubungan keduanya (Kabar24, 2016). Selain itu, otoritas Uni Eropa mengatakan berkomitmen penuh pada penerapan perjanjian Turki-Uni Eropa. Kepala juru bicara Komisi Eropa (badan eksekutif Uni Eropa) mengharapkan Eropa dan Turki tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya (The New York Times, 2016).